

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

Muhammad Atshil Muqtasyim Prima  
NPP. 30.0025

*Asdaf Kota Langsa, Provinsi Aceh*  
*Program Studi Kebijakan Publik*  
Email: Atshilm7@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mutia Rahmah, S.IP., M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *The author focuses on the problem of the many impacts of floods that often occur in Langsa City. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze and explain the supporting and inhibiting factors and efforts made in optimizing the implementation of flood management policies in Langsa City, Aceh Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that the implementation of flood management policies in Langsa City, Aceh Province has not been optimal with the findings of human resources who are still slow to respond and less responsive in disaster management activities, the unavailability of adequate technology in BPBD for disaster management activities, still lack of budget to fulfill facilities and infrastructure, inadequate equipment for disaster management. There are also factors that support the implementation of the flood management policy implementation program, namely the establishment of a DRR forum, providing additional tasks for the DRR forum, making SOPs for the implementation of flood management, and developing and dismissing existing human resources. Efforts to optimize the implementation of flood management policies in Langsa City, Aceh Province by conducting training for human resources to be more responsive in responding to disasters, purchasing technological resources to assist disaster management activities, increasing fundraising through entrepreneurs or the private sector. **Conclusion:** One of the efforts of the Langsa City government in flood management is the establishment of a DRR forum by BPBD to assist the process of disaster management activities in Langsa City, Aceh Province. And give additional tasks to the DRR forum to conduct deliberations to review and study disaster emergency response. This is made so that flood management in Langsa City runs optimally.*

**Keywords:** *Implementation, flood prevention policies*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya dampak bencana banjir yang sering terjadi di Kota Langsa. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Langsa Provinsi Aceh. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan

dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Langsa Provinsi Aceh belum optimal dengan temuan SDM yang masih lambat merespon dan kurang tanggap dalam kegiatan penanggulangan bencana, tidak tersedianya teknologi yang memadai di BPBD untuk kegiatan penanggulangan bencana, masih kurangnya anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana, tidak memadainya perlengkapan untuk penanggulangan bencana. Terdapat juga faktor yang mendukung pelaksanaan program implementasi kebijakan penanggulangan banjir, yaitu pembentukan forum PRB, pemberian tugas tambahan untuk forum PRB, pembuatan SOP untuk pelaksanaan penanggulangan banjir, dan pengembangan serta pemberhentian sumber daya manusia yang ada. Upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Langsa Provinsi Aceh dengan melakukan pelatihan terhadap SDM anggar bisa lebih tanggap dalam merespon bencana, melakukan pembelian sumber daya teknologi untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana, meningkatkan penggalangan dana melalui pengusaha atau pihak swasta. **Kesimpulan:** Upaya pemerintah Kota Langsa dalam penanggulangan banjir salah satunya adalah Dibentuknya forum PRB oleh BPBD untuk membantu proses kegiatan penanggulangan bencana di Kota Langsa Provinsi Aceh. Dan memberikan tugas tambahan terhadap forum PRB untuk melakukan musyawarah untuk mengkaji dan mempelajari tentang tanggap darurat bencana. Hal ini dibuat agar penanggulangan banjir di Kota Langsa berjalan secara optimal.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan Penanggulangan Banjir

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bencana alam merupakan peristiwa yang waktunya tidak dapat diprediksi, iklim yang tidak aman sering kali menjadi penyebab terjadinya bencana alam secara tiba-tiba (Suleman, 2017). Banjir adalah salah satu bencana alam di mana air mengalir di luar badan air, seperti sungai (Zalmita, 2021). Bencana banjir telah menjadi masalah yang tak ada habisnya bagi masyarakat di seluruh dunia sejak dulu, sekarang dan yang akan datang, bencana banjir adalah akibat dari gejala alam, aktivitas manusia, atau dapat pula disebabkan oleh alam dan manusia pada saat yang bersamaan (Kodoatie, 2021). Banjir merupakan penggenangan tanah yang disebabkan oleh luapan sungai sebagai akibat dari hujan lebat atau banjir dari daerah pegunungan lainnya (Findayani, 2018). Banjir alam dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, daya tampung sungai, daya tampung drainase, dan pengaruh pasang surut, sedangkan banjir disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, seperti Perubahan status air, Daerah Aliran Sungai (DAS). , pemukiman dekat pantai, kerusakan drainase tanah, kerusakan bangunan pelindung banjir, kerusakan hutan (vegetasi alami), desain sistem perlindungan banjir yang salah (Ulum, 2013). Banjir adalah fenomena alam yang melanda setiap negara di dunia (Saidah, 2020). Indonesia sudah lama dilanda banjir, misalnya di Jakarta, sejak tahun 1959 yang penduduknya relatif kecil (Rosyidie, 2013). Instansi pemerintah terkait dengan penanggulangan bencana bertugas melindungi warga negara Indonesia dari bahaya bencana alam tentu diperlukan agar perlindungan yang diberikan negara benar-benar optimal, oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah (Trisatio, 2022). Menurut data yang dirilis BNPB (2023), jumlah banjir di Indonesia pada tahun 2019 yaitu 784 kejadian, sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi 1.518 kejadian, dan di tahun 2021 banjir kembali mengalami peningkatan yaitu 1.794 kejadian, dan yang terakhir pada tahun 2022 jumlah banjir di Indonesia mengalami penurunan yaitu 1.531 kejadian. Dalam 4 tahun terakhir jumlah kejadian banjir bersifat fluktuatif yang artinya sudah menjadi tugas bagi pemerintah untuk bisa menanggulangi masalah banjir tersebut.

Banjir di Aceh juga memakan banyak korban, baik yang hilang, mengungsi, menderita, bahkan sampai meninggal, menurut data yang dirilis BNPB (2023), jumlah korban banjir di Aceh pada tahun 2019 adalah 71.070 jiwa, dan pada tahun 2020 jumlah korban banjir mengalami peningkatan yang tinggi yaitu 145.950 jiwa, sedangkan pada tahun 2021 jumlah korban banjir di Aceh mengalami penurunan yaitu 130.360 jiwa. Jika di lihat dari data tersebut berarti korban banjir di Aceh bersifat fluktuatif

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan Kota Langsa yang berada di urutan kelima dengan jumlah kejadian banjir terbanyak di Aceh dengan jumlah kejadian yaitu rata-rata 4 (empat) kejadian per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Kota Langsa berada di bawah Kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah kejadian yaitu rata-rata 6 (enam) kejadian per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Jumlah warga yang terdampak banjir pada tahun 2019 berjumlah 3.268 kepala keluarga (kk). Pada tahun 2020 jumlah warga yang terdampak banjir mengalami penurunan yaitu, berjumlah 1.482 kk, pada tahun 2021 mengalami kenaikan terhadap warga yang terdampak banjir yaitu, berjumlah 7.398 kk, pada tahun 2022 merupakan jumlah korban terdampak banjir tertinggi yaitu 14.367. Dari hasil data tersebut berarti jumlah warga yang terkena dampak banjir bersifat fluktuatif, tetapi pada tahun 2022 jumlah tersebut mengalami kenaikan yang tinggi. Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD juga didukung dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang analisis penanggulangan bencana maupun bahasan tentang peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Penelitian oleh Gunawan Pratama (2017) yang berjudul Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu, menemukan hasil bahwa Penanggulangan banjir oleh BPBD Kota Bengkulu masih belum optimal bahkan hampir sama sekali tidak dirasakan masyarakat. Karena banyak bangunan yang belum direnovasi misalnya tanggul dan kanal, aplikasi rekonstruksi dan rehabilitasi belum merata. Penelitian oleh Try Ayu Anggraini (2018) yang berjudul Evaluasi Sistem Drainase Dalam Upaya Penanggulangan Banjir di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, menemukan hasil bahwa Kondisi drainase di Desa Lumpue buruk karena mengalami drainase yang dangkal dan sistem drainase yang tidak memadai karena sedimentasi dan debit limbah yang sangat tinggi. Penelitian oleh Algafari (2020) yang berjudul Strategi Penanganan Banjir di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, menemukan hasil bahwa Risiko banjir di Desa Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dibagi menjadi dua, risiko banjir sedang dan risiko banjir tinggi. Penelitian oleh MHD Nur Alfin Ardi (2022) yang berjudul Analisis Perencanaan dan Penanggulangan Banjir Pada Jalan Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, menemukan hasil bahwa Dimensi saluran drainase di Jl. warna dengan lebar 0,60 m, dan tinggi 0,47 m, dapat menampung debit banjir sebesar 0,13 m<sup>3</sup>/detik. Data ini menunjukkan bahwa drainase tidak layak atau banjir tidak dapat ditangani. Penelitian oleh Dedek Marfirah (2021) Peran Camat Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, menemukan hasil bahwa Target kerja Kecamatan Bubon belum maksimal, karena masih banyak desa yang terjadi banjir ketika curah hujan tinggi.

## **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada evaluasi dan analisis penanganan banjir. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Try Ayu Anggraini tetapi

menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi menurut Dye (2017). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Langsa dan untuk mengetahui dan menganalisis terkait apa saja upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Langsa.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai bencana alam banjir di Kota Langsa. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penanggulangan banjir di Kota Langsa.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 11 orang yang diambil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa, dan Masyarakat Kota Langsa yang terdampak banjir.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori Implementasi menurut Dye (2017) menjelaskan bahwa implementasi mencakup semua kegiatan untuk memenuhi kebijakan yang ditentukan oleh Badan Legislatif. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Organisasi Pelaksana, Pedoman atau Aturan, Ketersediaan Personil, Sumber Daya. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

### **3.1. Pembentukan Organisasi Baru**

Pembentukan organisasi baru yang ada di BPBD Kota Langsa adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam membantu penanggulangan banjir di Kota Langsa. organisasi baru yang ada di BPBD adalah Forum PRB, menjadi pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Langsa. Forum PRB yang dibentuk oleh BPBD didukung dengan adanya landasan hukum yang jelas mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mengurangi terjadinya kesalahan. Tugas tambahan organisasi baru yaitu melakukan musyawarah dan mengkaji tentang risiko bencana dan cara menanggulangnya. Dan juga forum PRB ini diatur dan dilandasi dengan dasar hukum yaitu Perwali Langsa No. 8 tahun 2021 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana.

### **3.2. Penambahan Tugas Organisasi Eksisting**

Berkaitan dengan adanya organisasi baru yaitu forum PRB, maka juga terdapat penambahan tugas yang diberikan sesuai dengan keadaan di lapangan. Forum PRB yang dibentuk kemudian diberi tugas untuk mengadakan musyawarah antara anggotanya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana yang ada di Kota Langsa dan setelah itu nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat tentang bahayanya risiko bencana yang ada di Kota Langsa.

### **3.3. Pembuatan SOP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah rangkaian prosedur kegiatan yang dijadikan standar dalam pelaksanaan kegiatan. SOP adalah pedoman yang dapat menjadi pendukung dalam proses kegiatan implementasi menjadi lebih efisien dan efektif. Setelah SOP selesai dibuat kemudian serahkan kepada Walikota untuk disahkan. Dalam pembuatan SOP BPBD mempunyai landasan hukum yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Keberhasilan sebuah kebijakan menurut Dye sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) dimensi dengan 12 atributnya. Atribut-atribut inilah yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Langsa Provinsi Aceh. Dimensi dan atribut dalam teori yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Organisasi Pelaksana, terdiri dari 2 (dua) atribut yakni pembentukan organisasi baru dan penambahan tugas organisasi eksisting.
2. Anggaran Pelaksanaan, terdiri dari 2 (dua) atribut yakni pendapatan dan belanja.
3. Peraturan Pelaksanaan, terdiri dari 3 (tiga) atribut yakni pembuatan SOP, diskresi, dan pemberian sanksi.
4. Sumber Daya Manusia, terdiri dari 3 (tiga) atribut yakni rekrutmen, pengembangan, dan pemberhentian.
5. Sumber Daya Lainnya berupa Teknologi, terdiri dari 2 (dua) atribut yakni ketersediaan infrastruktur dan ketetapan penggunaan.

Atribut-atribut tersebut saling mempengaruhi dan berkesinambungan satu sama lain, yang kemudian turut mempengaruhi keseluruhan proses implementasi kebijakan. Berdasarkan 12 atribut yang ada, terdapat atribut yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Langsa Provinsi Aceh.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban penanggulangan banjir adalah SDM masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana walaupun sudah ada pelatihan untuk SDM yang ada tetapi waktu terjadinya banjir di kota Langsa, SDM masih kurang tanggap dan lambat dalam menindaklanjuti banjir sehingga dari BPBD meminta bantuan dari polri dan TNI untuk membantu dalam penanggulangan bencana.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Langsa dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemerintah Kota Langsa dalam penanggulangan banjir salah satunya adalah Dibentuknya forum PRB oleh BPBD untuk membantu proses kegiatan penanggulangan bencana di Kota Langsa Provinsi Aceh. Dan memberikan tugas tambahan terhadap forum PRB untuk melakukan

musyawarah untuk mengkaji dan mempelajari tentang tanggap darurat bencana. Hal ini dibuat agar penanggulangan banjir di Kota Langsa berjalan secara optimal.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dalam melaksanakan penelitian membuat data dan informasi mengenai penanggulangan banjir serta dampak dari bencana banjir di Kota Langsa belum maksimal dan belum bisa melingkupi keseluruhan dari aspek penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Langsa, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Algafari, A. (2020). *Strategi Penanganan Banjir di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. 9(2), 68–81. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/17221%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/17221/1/ALGAFARI-60800115053.pdf>
- Anggraini, T. A. (2018). *Evaluasi Sistem Drainase Dalam Upaya Penanggulangan Banjir di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ardi, M. H. D. N. A. (2022). *Analisis Perencanaan Dan Penanggulangan Banjir Pada Jalan Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun (Studi Penelitian)*.
- Marfirah, D. (2021). *Peran Camat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat*. Prodi Ilmu Administrasi Negara.
- Pratama, G. (2017). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Bengkulu. In *UNIB Scholar Repository*. [http://repository.unib.ac.id/12189/2/PDF Skripsi Gunawan Pratama.pdf](http://repository.unib.ac.id/12189/2/PDF%20Skripsi%20Gunawan%20Pratama.pdf)
- Kodoatie, R. J. (2021). *Rekayasa dan manajemen banjir kota*. Penerbit Andi.
- Saidah, D. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Östudi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 Di .... *Jurnal Media Birokrasi*, 185–202.
- Ulum, M. C. (2013). Governance Dan Capacity Building Dalam 72 Manajemen Bencana Banjir Di Indonesia. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*. <https://perpustakaan.bnpb.go.id/jurnal/index.php/JDPB/article/view/66>